

PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PENDUDUK USIA NON
PRODUKTIF, DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



OLEH:

MEGA MUSTIKA
16279/2010

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

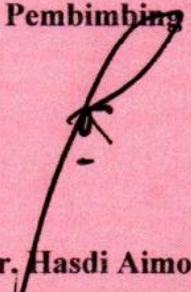
**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PENDUDUK USIA NON
PRODUKTIF, DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT**

**OLEH :
MEGA MUSTIKA
NIM/TM : 16279/2010**

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode mei
2016 dan telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing.**

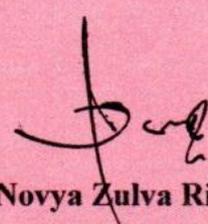
**Padang, Mei 2016
Disetujui Oleh :**

Pembimbing I


Dr. Hasdi Aimon, M.Si

NIP: 19550505 197903 1 010

Pembimbing II


Novya Zulva Riani, SE, M.Si

NIP: 19711104 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

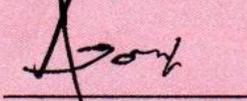
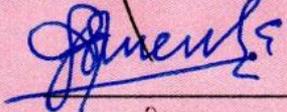
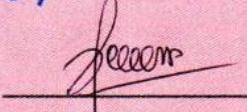
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDAPATAN PERKAPITA, PENDUDUK USIA NON
PRODUKTIF, DAN PENERIMAAN PAJAK TERHADAP JAMINAN
SOSIAL KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT**

Nama : Mega Mustika
TM/NIM : 2010/16279
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mei 2016

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Hasdi Aimon, M.Si	
2.	Sekretaris	: Novya Zulva Riani, SE, M.Si	
3.	Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	
4.	Anggota	: Dewi Zaini Putri, SE, MM	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Mustika
Nim/ Tahun Masuk : 16279/2010
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang/ 09 Oktober 1991
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Keahlian : Ekonomi publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : jln. Ngurahrai III no. 3, Air Tawar Timur, Padang
No. HP/telp. : 085278421895
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Perkapita, Penduduk usia non Produktif, dan Penerimaan Pajak terhadap Jaminan Sosial Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, April 2016

Yang Menyatakan



Mega Mustika
Mega Mustika

Nim/Bp. 16279/2010

ABSTRAK

Mega Mustika, 2010/16279. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Penduduk Usia Non Produktif, dan Penerimaan Pajak terhadap Jaminan Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang, di Bawah Bimbingan Bapak Dr. Hasdi Aimon. M.Si, dan Ibu Novya Zulva Riani, SE,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh (1) pendapatan perkapita, (2) penduduk usia non produktif, dan (3) penerimaan pajak terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat. (4) Serta untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dan variabel terikat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data panel dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat dengan *series* tahun 2011-2013. Teknik pengumpulan data dokumentasi melalui Badan Pusat Statistik Sumatera Barat dan DJPK depkeu.go.id. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis induktif Model Regresi Panel. Pada analisis induktif terdapat beberapa uji yaitu: Uji Asumsi Klasik, Uji t, dan Uji F dengan tingkat α sebesar 5%.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan perkapita terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. (2) Penduduk usia non produktif/lansia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat. (3) penerimaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial di kabupaten/Kota Sumatera Barat. (4) terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif/lansia, dan penerimaan pajak secara bersama-sama terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat.

Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini yaitu (1) pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi dana untuk jaminan sosial dari total APBD yang masih rendah. (2) pemerintah Sumatera Barat perlu meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara menggiatkan usaha disemua sektor perekonomian yang dapat memicu perkembangan ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi. (3) untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial.

Kata kunci: Pengeluaran jaminan sosial, Pendapatan perkapita, Penduduk usia non produktif, Penerimaan pajak.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya yang telah memberi penulis kekuatan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Perkapita, Penduduk Usia Non Produktif dan Penerimaan Pajak terhadap Jaminan Sosial Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat”. Skripsi ini merupakan salah syarat menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan, baik moril maupun materil dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hasdi Aimon. M.Si selaku pembimbing I dan ibu Novya Zulva Riani, SE,M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Ali Anis, M.S dan ibu Novya Zulva Riani, SE,M.Si, selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
4. Teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orangtua, adik, kakak dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, bantuan moril dan materil kepada penulis selama penulis kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang, Teman-teman kos pondokan putri, terutama kamar 5 dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang Bapak/Ibu, Orang Tua, dan rekan-rekan berikan menjadi suatu nilai ibadah dan diberikan balasan dari ALLAH SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga karya tulis ini memberi arti dan manfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Semoga segala bimbingan dan dorongan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.

Padang, April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PEGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	17
1. Jaminan Sosial.....	17
2. Pendapatan Perkapita	20
a. Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Pengeluaran untuk Jaminan Sosial.....	23
3. Struktur Usia Penduduk	24
a. Berdasarkan Aspek Biologis	24
b. Berdasarkan Aspek Sosial.....	25

c. Hubungan Penduduk Usian Non Produktif Dengan Pengeluaran Untuk Jaminan Sosial.....	26
4. Penerimaan Pajak	27
a. Pengertian Pajak	27
b. Unsur-Unsur Pajak	29
c. Teori Pemungutan Pajak	29
d. Hubungan Penerimaan Pajak Dengan Pengeluaran Untuk Jaminan Sosial	31
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Hipotesis.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Jenis data dan sumber data.....	40
D. Variabel penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Defenisi Operasional.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
1. Analisis Deskriptif	42
2. Analisis Induktif	44
a. Model Regresi Panel	44
b. Estimasi Model Regresi Panel	45

1) Common Effect Model.....	45
2) Fixed Effect Model	45
3) Random Effect Model.....	45
c. Pemilihan Teknik Regresi Data Panel.....	46
1) Uji Chow	46
2) Uji Hausman.....	46
d. Uji Asumsi Klasik	47
1) Uji Autokorelasi	47
2) Uji Heteroskedastisitas.....	48
3) Uji Multikolinearitas	49
e. Koefisien Determinasi.....	49
f. Uji Hipotesis.....	50
1) Uji t	50
2) Uji F	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	53
1. Analisis Deskriptif variabel penelitian	53
a. Deskripsi pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial di kabupaten/kota sumatera barat	53
b. Deskripsi pendapatan perkapita kabupaten/kota di sumatera barat	56
c. Deskripsi penduduk usia non produktif kabupaten/kota di sumatera barat	59

d.	Deskripsi penerimaan pajak kabupaten/kota di Sumatera Barat	62
2.	Analisis induktif	65
a.	Analisis model regresi panel	65
1)	Uji Chow test	65
2)	Uji Hausman	66
3)	Model regresi panel	67
b.	Uji asumsi klasik	70
1)	Heteroskedastisitas	70
2)	Multikolinearitas	71
3)	Autokorelasi	72
c.	Koefisien determinasi (R^2)	73
d.	Pengujian hipotesis	74
1)	Uji t	74
2)	Uji F	75
B.	Pembahasan	76
1.	Pengaruh pendapatan perkapita terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial	76
2.	Pengaruh penduduk usia non produktif terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial	79
3.	Pengaruh penerimaan pajak terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial	81

4. Pengaruh pendapatan perkapita(X1), penduduk usia non produktif (X2), dan penerimaan pajak(X3) terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial (Y) di provinsi sumatera barat	83
---	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	90
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1. Realisasi pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial menurut provinsi di pulau Sumatera.....	2
2. Perkembangan jaminan sosial perkapita kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2011-2013.....	4
3. Pendaptan perkapita kabupaten/kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2013	6
4. Penduduk usia nonproduktif kabupaten dan kota di Sumatera Barat	10
5. Realisasi penerimaan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat tahun 2011-2013.....	12
6. Nilai d (D-W)	48
7. Deskripsi pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten/kota di sumatera barat tahun 2011-2013	54
8. Deskripsi pendapatan perkapita kabupaten dan kota di sumatera barat tahun 2011-2013.....	57
9. Deskripsi penduduk usia non produktif di Sumatera Barat	60
10. Deskripsi realisasi penerimaan pajak pemerintah kabupaten dan kota di sumatera barat tahun 2011-2013	63
11. Hasil uji chow	66
12. Hasil Uji hausman	66
13. Hasil estimasi regresi panel.....	68
14. Hasil Uji Heterokedastisitas	71
15. Hasil matrik korelasi	72
16. Hasil Uji autokorelasi.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1	Data Jaminan Sosial, Pendapatan Perkapita, Penduduk Usia Non Produktif/Lansia, dan Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013.....	90
Lampiran 2	Common Effect Model	92
Lampiran 3	Fixed Effect Model.....	93
Lampiran 4	Random Effect Model	94
Lampiran 5	Uji Chow.....	95
Lampiran 6	Uji Hausman	95
Lampiran 7	Tabel T.....	96
Lampiran 8	Tabel F.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat menginginkan kemakmuran material dan spiritual dalam arti dapat terpenuhi keinginan atau kebutuhannya yang selalu berkembang, maka bagi masyarakat sebagai keseluruhan menghendaki keamanan (termasuk kestabilan), keadilan dan kemakmuran, di sini pemerintah dalam kegiatannya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut agar keinginan masyarakat terpenuhi. Dalam pelaksanaannya digunakan barang-barang dan jasa dengan berbagai bentuk termasuk berupa uang. Penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah inilah yang dimaksudkan dengan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan.

Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu pengeluaran untuk jaminan sosial/perlindungan sosial. (Depkes, 2004) menyatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial.

Tidak semua jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk uang. Ada sejumlah santunan negara yang diberikan dalam bentuk barang (in kind) atau pelayanan: pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sebagainya. Secara yuridis formal, keharusan untuk memberikan jaminan sosial adalah hal yang bersifat universal. *Declaration of Human Rights* pasal 25 secara eksplisit menetapkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, penganggur dan meninggal dunia. Norma ini telah lama dijalankan oleh negara-negara industri maju, dan sernakin hari sernakin banyak negara berkembang dan sedang berkembang yang mengembangkan sistem pada level nasional untuk memastikan tegaknya jaminan sosial bagi mereka yang semestiny berhak untuk mendapatkannya. Berikut realisasi pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial di provinsi-provinsi pulau sumatera.

Tabel 1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah untuk Jaminan Sosial Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2013

No	Provinsi	Jaminan Sosial (Rp. 000.000)			MEAN
		2011	2012	2013	
1	Aceh	191.806	248.876	300.685	247.122
2	Sumatera Utara	224.059	261.967	438.047	308.024
3	Sumatera Barat	162.441	209.749	228.067	200.086
4	Riau	164.198	271.391	370.157	268.582
5	Jambi	76.917	177.44	207.768	142.343
6	Sumatera Selatan	123.000	174.985	230.936	176.307
7	Bengkulu	71.922	95.1	119.018	95.470
8	Lampung	82.927	64.427	188.688	112.014
	Rata-Rata Sumatera	137.159	205.233	260.421	193.743

Sumber: *DJPK depkeu.go.id (data diolah tahun 2016)*

Tabel 1 memperlihatkan realisasi pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial dimana Sumatera Barat memiliki pengeluaran pemerintah tertinggi keempat setelah Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Aceh yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2011-2013. Pencapaian tersebut sudah memenuhi rata-rata pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial di pulau Sumatera yaitu di atas Rp. 193.743.000.000. Realisasi pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial di Sumatera Barat sebesar Rp. 200.086.000.000 lebih rendah dari Provinsi Aceh yang memiliki jumlah penduduk di bawah Sumatera Barat.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 pengeluaran untuk jaminan sosial di Sumatera Barat masih di bawah rata-rata provinsi di pulau Sumatera yaitu sebesar Rp. 228.067.000.000. Sedangkan rata-rata provinsi di pulau Sumatera pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 260.421.000.000. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera, namun pengeluaran untuk jaminan sosialnya masih rendah dibanding dengan beberapa provinsi di pulau Sumatera.

Pemerintah mutlak diperlukan di dalam setiap bentuk atau sistem perekonomian yang tidak hanya untuk menyediakan barang-barang publik, melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi maupun konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dapat kita lihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proporsinya terhadap penghasilan nasional. Pada tabel 1 dapat kita lihat seberapa besar pengeluaran untuk jaminan sosial perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Tabel 2. Perkembangan Jaminan Sosial Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2013.

NO	Kab/Kota	Jaminan Sosial Perkapita(Rp)			MEAN
		2011	2012	2013	
1	Kep. Mentawai	107.358,87	166.613,60	191.324,54	155.099,00
2	Pesisir Selatan	18.780,90	21.072,21	21.591,17	20.481,43
3	Kab. Solok	37.289,47	40.622,17	39.756,35	39.222,67
4	Sijunjung	29.828,37	58.494,08	88.264,35	58.862,27
5	Tanah Datar	16.313,04	20.044,26	68.913,62	35.090,31
6	Padang Pariaman	31.447,98	40.125,18	70.637,83	47.403,66
7	Kab. Agam	29.648,28	28.368,47	70.384,03	42.800,26
8	Lima Puluh Kota	20.633,04	30.697,22	104.240,35	51.856,87
9	Pasaman	43.184,53	46.329,30	160.659,19	83.391,01
10	Solok Selatan	37.152,89	82.385,12	305.814,49	141.784,17
11	Damasraya	29.046,20	39.800,82	245.711,63	104.852,88
12	Pasaman Barat	25.466,31	38.112,01	143.693,04	69.090,45
	Rata-rata Kabupaten	35.512,49	51.055,37	125.915,88	70.827,91
13	Padang	20.409,42	21.388,54	22.600,29	21.466,08
14	Solok	88.721,58	107.666,14	136.526,02	110.971,25
15	Sawahlunto	85.001,65	115.192,53	124.855,86	108.350,02
16	Padang Panjang	179.844,18	196.878,83	122.153,59	166.292,20
17	Bukittinggi	70.904,78	73.757,81	40.072,72	61.578,44
18	Payakumbuh	37.835,10	61.621,45	27.714,43	42.390,33
19	Pariaman	97.122,21	78.434,52	25.594,17	67.050,30
	Rata-rata Kota	82.834,13	93.562,83	71.359,58	82.585,52
	SUMBAR	52.946,78	66.716,01	105.816,19	75.159,66

Sumber: *DJPK depkeu.go.id (data diolah tahun 2015)*

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat dimana dari tahun 2011 sampai 2013 rata-rata jaminan sosial perkapita di Sumatera Barat Rp 75.159,66. sedangkan rata-rata jaminan sosial perkapita untuk kabupaten sebesar Rp 70.827,91 dan rata-rata kota sebesar Rp 82.585,52 jauh lebih besar dibanding rata-rata kabupaten. Terdapat empat kabupaten yang memiliki rata-rata jaminan sosial perkapita diatas rata-rata yaitu Kabupaten Kep.Mentawai, Solok Selatan, Damasraya, dan Kabupaten Pasaman,

sedangkan daerah yang lainnya memiliki rata-rata jaminan sosial perkapita di bawah rata-rata. Dan kabupaten yang memiliki rata-rata paling rendah yaitu Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar Rp 20.481,43.

Jika dilihat dari rata-rata daerah kota di Sumatera Barat terdapat beberapa Kota yang memiliki rata-rata jaminan sosial perkapita diatas rata-rata yaitu Kota Padang Panjang, Sawahlunto, dan Kota Solok. Sedangkan daerah kota yang lainnya memiliki rata-rata jaminan sosial perkapita di bawah rata-rata dan rata-rata terendah terlihat pada Kota Padang yaitu sebesar Rp 21.466,08 jauh dibawah rata-rata Kota, hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah penduduk kota padang dibanding dengan daerah lain di Sumatera Barat, dan Padang juga merupakan ibukota dari Sumatera Barat. Jaminan sosial memiliki tujuan yang sama dengan peningkatan pendapatan yaitu mensejahterakan masyarakat suatu Negara, apabila pendapatan suatu Negara meningkat, maka jaminan sosial/ perlindungan sosial suatu Negara terhadap penduduknya juga ikut meningkat.

Tingkat kemajuan suatu pembangunan dapat dilihat melalui pencapaian tingkat pertumbuhan pendapatan (*income*). Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan ukuran kemampuan suatu Negara atau daerah dalam memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Indikator yang paling tepat dalam menggambarkan tingkat pendapatan suatu daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam daerah tertentu, PDRB harga konstan merupakan tolak ukur yang paling mendekati

dalam mengukur tingkat pendapatan dan menghitung pertumbuhan ekonomi, karena merupakan perkembangan produksi riil suatu daerah. Di Sumatera Barat perkembangan pendapatan perkapita yang terangkum dalam PDRB/kapita dapat dilihat dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2013 (satuan rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	PDRB/Kapita (jutaan rupiah)			MEAN
		2011	2012	2013	
1	Kep. Mentawai	7,24	7,51	7,61	7,45
2	Pesisir Selatan	5,13	5,37	5,62	5,37
3	Kab. Solok	6,55	6,89	7,26	6,90
4	Sijunjung	6,94	7,26	7,45	7,22
5	Tanah Datar	8,15	8,53	9,04	8,57
6	Padang Pariaman	7,74	8,15	8,62	8,17
7	Kab. Agam	7,14	7,56	7,94	7,55
8	Lima Puluh Kota	8,59	9,04	9,46	9,03
9	Pasaman	5,67	5,96	6,20	5,94
10	Solok Selatan	4,75	4,98	5,11	4,95
11	Damasraya	6,33	6,63	6,66	6,54
12	Pasaman Barat	7,77	8,15	8,32	8,08
	Rata-rata Kabupaten	6,83	7,17	7,44	7,15
13	Padang	15,15	15,96	16,56	15,89
14	Solok	9,27	9,72	9,96	9,65
15	Sawahlunto	9,57	10,04	10,48	10,03
16	Padang Panjang	9,80	9,85	10,17	9,94
17	Bukittinggi	9,20	10,17	10,45	9,94
18	Payakumbuh	7,86	8,29	8,58	8,24
19	Pariaman	9,56	10,03	10,41	10,00
	Rata-rata Kota	10,06	10,58	10,94	10,53
	SUMBAR	8,02	8,43	8,73	8,39

Sumber: *BPS Sumatera Barat, Sumatera Barat dalam angka 2012-2014 (data diolah 2015).*

Tingkat pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat beberapa tahun belakang ini cenderung mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada tabel di atas, yang mana dari tahun ketahun PDRB/kapita Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat terus menunjukkan tren yang positif. Dari tabel 2 di atas dapat dilihat dimana dari tahun 2011 sampai 2013 rata-rata pendapatan perkapita daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebesar Rp 8.390.000. Terdapat 8 daerah yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita di atas rata-rata yaitu Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang panjang, Bukittinggi, dan Kota Pariaman, sedangkan daerah yang lainnya memiliki rata-rata pendapatan perkapita di bawah rata-rata.

Kota Padang memiliki rata-rata pendapatan perkapita yang tertinggi dibandingkan Kab/Kota lainnya di Sumatera Barat yaitu sebesar Rp.15.890.000. Hal ini tak lain disebabkan karena multiplier efek dari kedudukan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan yang lengkap dengan sarana prasarana penunjang perekonomian sehingga menyebabkan perekonomian Kota Padang memiliki angka yang besar.

Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata pendapatan perkapita yang paling rendah adalah Kabupaten Solok Selatan yaitu dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar Rp.4.950.000 hal ini disebabkan karna PDRB riil Kabupaten Solok Selatan cukup rendah bila dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat, sedangkan jumlah penduduknya cukup besar yaitu 149.601 jiwa.

Secara umum PDRB/kapita yang terjadi pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengambil kebijakan

untuk menunjang lancarnya roda perekonomian masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan output secara keseluruhan.

(Adolf Wagner) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Fenomena yang ada pada data diatas terdapat 4 daerah yang memiliki pendapatan perkapita di atas rata-rata yaitu, kota Padang, Tanah Datar, Limapuluh Kota dan kota Pariaman, namun pengeluaran untuk jaminan sosialnya masih di bawah rata-rata. Selain itu juga terlihat ada 5 daerah kab/kota yang pendapatan perkapitanya terus meningkat namun pengeluaran untuk jaminan sosialnya berfluktuasi. Daerah tersebut yaitu, kab.solok, kab.agam, kota padang panjang, payakumbuh, dan pariaman.

Selain pendapatan perkapita, pengeluaran untuk jaminan sosial juga dipengaruhi oleh penduduk usia non produktif/usia lanjut karena semakin besar penduduk usia non produktif maka pengeluaran untuk jaminan sosial juga semakin besar karena jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pension (UU No. 40 Tahun 2004 paragraf ketiga). Pada tabel 3 dapat kita lihat jumlah penduduk usia non produktif/usia lanjut kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2011-2013.

Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk usia non produktif di kabupaten pada tahun 2011-2013 lebih tinggi dibanding dengan kota di Sumatera Barat, yaitu 17.634 jiwa pada kabupaten dan 8.726 jiwa rata-rata pada kota di Sumatera Barat. rata-rata jumlah penduduk usia non produktif tertinggi di kabupaten terlihat pada Kab.Agam yaitu sebesar 33.621 jiwa, sedangkan rata-rata jumlah penduduk usia non produktif tertinggi di kota terlihat pada kota Padang yaitu sebesar 34.896 jiwa.

Tabel 4. Penduduk Usia Non Produktif Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

NO	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia tidak produktif (jiwa)			MEAN
		2011	2012	2013	
1	Kep. Mentawai	2.027	4.253	1.891	2.724
2	Pesisir Selatan	25.299	24.144	23.443	24.295
3	Kab. Solok	20.873	19.410	20.341	20.208
4	Sijunjung	9.816	11.311	9.689	10.272
5	Tanah Datar	28.792	18.781	27.862	25.145
6	Padang Pariaman	30.508	21.703	29.222	27.144
7	Kab. Agam	37.737	37.864	25.262	33.621
8	Lima Puluh Kota	26.579	19.650	25.999	24.076
9	Pasaman	11.595	11.750	12.782	12.042
10	Solok Selatan	6.682	8.080	6.657	7.140
11	Damasraya	7.550	10.976	7.764	8.763
12	Pasaman Barat	13.939	20.496	14.112	16.182
	Rata-rata Kabupaten	18.450	17.368	17.085	17.634
13	Padang	36.808	35.624	32.255	34.896
14	Solok	2.334	3.341	2.341	2.672
15	Sawahlunto	3.715	3.785	3.627	3.709
16	Padang Panjang	2.368	2.628	2.664	2.553
17	Bukittinggi	5.282	5.296	5.272	5.283
18	Payakumbuh	6.863	6.685	6.780	6.776
19	Pariaman	5.205	5.268	5.111	5.195
	Rata-rata Kota	8.939	8.947	8.293	8.726
	SUMBAR	14.946	14.266	13.846	14.352

Sumber: *BPS Sumatera Barat, kabupaten dan kota dalam angka 2012-2014 (data diolah 2015).*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki rata-rata jumlah penduduk usia non produktif terendah yaitu kab. Kep.Mentawai yaitu sebesar 2.724 jiwa jauh dibawah rata-rata kabupaten, sedangkan di kota Sumatera Barat hampir semua kota yang memiliki jumlah penduduk usia non produktif di bawah rata-rata kota yaitu kota Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan kota Pariaman. dan rata-rata kota yang paling rendah yaitu kota Padang Panjang

sebesar 2.553 jiwa hal ini disebabkan karena Padang Panjang merupakan kota kecil yang tidak terlalu banyak penduduknya.

Ada beberapa masalah yang peneliti temukan dari data pengeluaran untuk jaminan sosial dan penduduk usia tidak produktif namun yang paling menonjol yaitu Kabupaten Agam dan kota Padang. Pada kabupaten Agam dan kota Padang terlihat bahwa rata-rata jumlah penduduk usia non produktif paling tinggi di kabupaten Agam dan kota Padang, namun rata-rata pengeluaran untuk jaminan sosialnya sangat rendah, bahkan jauh dibawah rata-rata Sumatera Barat.

Rostow dan Musgrave, Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. (Eko Sriyanto, 2012) perkembangan jumlah lansia/penduduk usia tidak produktif akan mempengaruhi pola pelayanan publik yang harus disediakan Negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama lansia. Penurunan kondisi fisik dan psikososial lansia menyebabkan lansia mengalami penurunan aktivitas, sehingga lansia dianggap tidak lagi mampu produktif dan menjadi beban Negara.

(Suharto, 2012:53) Negara perlu memberikan pelayanan sosial (*social services*) kepada warganya sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyat yang memilihnya. Salah satu wewenang yang diberikan publik kepada Negara adalah memungut pajak dari rakyat. Karenanya, prinsip utama yang mendorong mengapa Negara perlu memberikan jaminan sosial adalah bahwa semua bentuk perlindungan

sosial diatas termasuk dalam kategori “hak-hak dasar warga Negara” yang wajib dipenuhi oleh Negara sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap kontituen yang telah memilihnya. Pada tabel 4 dapat kita lihat seberapa besar penerimaan pemerintah terhadap pajak di kabupaten/kota Sumatera Barat pada tahun 2011-2013.

Tabel 5. Realisasi penerimaan pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2011-2013 (ribu rupiah)

NO	Kabupaten/Kota	Penerimaan Pajak(ribu rupiah)			MEAN
		2011	2012	2013	
1	Kep. Mentawai	517.765	0	189.100	235.622
2	Pesisir Selatan	6.628.724	7.026.802	10.708.327	8.121.284
3	Kab. Solok	5.375.403	6.233.467	6.598.153	6.069.008
4	Sijunjung	4.606.008	4.971.847	4.713.748	4.763.868
5	Tanah Datar	5.438.175	7.293.770	8.191.152	6.974.366
6	Padang Pariaman	10.024.892	13.267.033	15.060.000	12.783.975
7	Kab. Agam	9.301.549	12.235.811	11.863.133	11.133.498
8	Lima Puluh Kota	5.141.905	9.682.935	6.015.000	6.946.613
9	Pasaman	3.651.245	4.837.783	4.939.153	4.476.060
10	Solok Selatan	4.334.398	2.339.168	6.409.089	4.360.885
11	Damasraya	5.809.883	6.351.543	10.056.740	7.406.055
12	Pasaman Barat	6.684.667	7.704.531	10.730.000	8.373.066
	Rata-rata Kabupaten	5.626.218	6.828.724	7.956.133	6.803.692
13	Padang	102.412.436	128.595.100	153.005.000	128.004.179
14	Solok	2.328.100	3.911.741	3.481.124	3.240.322
15	Sawahlunto	2.320.144	2.969.920	2.815.950	2.702.005
16	Padang Panjang	3.001.439	3.514.178	4.066.000	3.527.206
17	Bukittinggi	17.461.946	19.848.458	24.182.219	20.497.541
18	Payakumbuh	4.569.624	5.720.645	5.404.604	5.231.624
19	Pariaman	2.485.410	3.103.926	2.592.500	2.727.279
	Rata-rata kota	19.225.586	23.951.995	27.935.342	23.704.308
	SUMBAR	10.636.511	13.137.298	15.316.894	13.030.234

Sumber: statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2011-2013 (data diolah 2015)

Pada tabel 5 dapat dilihat dari tahun ketahun rata-rata penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di Sumatra barat terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 10.636.511 pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp 13.137.298 pada tahun 2012

dan terus meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 15.316.894. rata-rata penerimaan pajak di kabupaten jauh lebih rendah dibanding dengan penerimaan pajak dikota, yaitu sebesar Rp 6.803.692 dikabupaten dan Rp 23.704.308 dikota.

Kabupaten yang memiliki penerimaan pajak dibawah rata-rata kabupaten yaitu, kep.mentawai Rp 235.622, kab.solok Rp 6.069.008, sijunjung Rp 4.763.868, pasaman Rp 4.476.060, dan solok selatan Rp 4.360.885. sedangkan kabupaten yang memiliki rata-rata penerimaan pajak tertinggi yaitu terlihat pada kabupaten Padang Pariaman yaitu sebesar Rp 12.783.975.

Jika dilihat dari rata-rata penerimaan pajak di kota, pada tabel terlihat bahawa kota padang dan bukittinggi merupakan kota yang penerimaan pajaknya paling tinggi, yaitu sebesar Rp 128.004.179 dikota padang dan Rp 20.497.541 di kota Bukittinggi, namun tetap saja pengeluaran untuk jaminan sosialnya jauh dibawah rata-rata kota. Sedangkan kota yang memiliki penerimaan pajak terendah terlihat pada kota sawahlunto dan pariaman namun pengeluaran untuk jaminan sosial kota sawahlunto jauh diatas rata-rata kota. hal ini tidak sesuai dengan teori berikut:

Teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan di atas, maka peneliti akan melihat sejauhmana pengaruh variable-variabel bebas terhadap variable terikat. Untuk itu penulis tertarik membahas dan meneliti masalah ini dalam formasi judul : *“Pengaruh pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif, dan penerimaan pajak terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pendapatan perkapita terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
2. Sejauhmana pengaruh penduduk usia non produktif terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat?
3. Sejauhmana pengaruh penerimaan pajak terhadap jaminan sosial Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat?
4. Sejauhmana pengaruh pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif, dan penerimaan pajak secara bersama sama terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang :

1. Pengaruh pendapatan perkapita terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh penduduk usia non produktif terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh penerimaan pajak terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif, dan penerimaan pajak secara bersama sama terhadap jaminan sosial kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang perekonomian dan pengeluaran pemerintah di Sumatera Barat.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Ekonomi makro yang membahas tentang masalah perekonomian, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, dan penerimaan pajak.
3. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil, khususnya kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang memiliki keterkaitan untuk mengembangkan penelitian ini.
5. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Teori

1. Jaminan Sosial

ILO (2002) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya.

Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga berfungsi sebagai perlindungan bagi individual dalam menghadapi kondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh mereka sendiri (Von Hauff dan De Haan; 1997). Rostow dan Musgrave dalam (Guritno 2001:170) Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

(Suharto, 2012:53) Negara perlu memberikan pelayanan sosial (*social services*) kepada warganya sebagai bentuk tanggungjawab moral terhadap rakyat yang memilihnya. Salah satu wewenang yang diberikan publik kepada Negara adalah memungut pajak dari rakyat. Karenanya, prinsip utama yang mendorong mengapa Negara perlu memberikan jaminan sosial adalah bahwa semua bentuk perlindungan sosial diatas termasuk dalam kategori “hal-hak dasar warga Negara” yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai wujud pertanggungjawaban moral terhadap kontituen yang telah memilihnya. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sedangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan social oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (depkes, 2004). Bentuk program SJSN yaitu Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya (depkes.go.id, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 pasal 5 tahun 2004, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata

Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Program jaminan kesehatan dapat berupa jaminan kesehatan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang luas di negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru. Sistem ini diterapkan sebagai sebuah alternatif mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial multidimensional akibat krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme pasar.

Meskipun Secara formal Indonesia bukan negara kesejahteraan, secara konstitusional masyarakat dijamin kesejahteraannya. Sila keadilan sosial yang dijabarkan dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara.

Istilah jaminan sosial muncul pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* tahun 1935 untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, manula, orang-orang sakit dan anak-anak akibat depresi ekonomi. Meskipun penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara maju belakangan ini mengalami perubahan, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana pada hakekatnya difahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Cheyne, O'Brein dan Belgrave dalam Mudiyono (2002) jaminan sosial pada

dasarnya adalah pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Untuk jelasnya mari kita cermati kutipan berikut ini. Menurut mereka, apa yang kita kenal sebagai 'jaminan sosial' ini adalah: Pertama, *as a system of state financial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market.* Kedua, *As a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately.*

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial adalah fungsi perlindungan Negara kepada warga Negaranya yang lemah melalui pemberian dukungan finansial, Tidak semua jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk uang. Ada sejumlah santunan negara yang diberikan dalam bentuk barang (in kind) atau pelayanan: pelayanan kesehatan, pendidikan dan perumahan dan sebagainya tepatnya santunan. Mereka dianggap "berhak" untuk mendapatkan santunan ini karena mekanisme pasar gagal dalam menyediakan sumber-sumber pendapatan seperti lapangan kerja yang langka. Disamping itu santunan itu juga diberikan kepada kelompok lemah yang lain, meskipun kelemahan mereka bukan disebabkan oleh kegagalan pasar. Yang masuk dalam kategori ini adalah mereka yang karena kondisi fisiknya (cacat, sakit, hamil, memasuki hari tua) tidak mampu memperoleh pendapatan sebagaimana telah disediakan pasar.

2. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu yang biasanya satu

tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu Negara pada suatu periode tertentu.

Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tertentu. Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu Negara pada tahun tertentu.

Konsep pendaptan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah pendapatan domestik bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan perkapita dari suatu Negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Richardson,2001) :

$$\text{PDB perkapita} = \frac{\text{PDB}_t}{\text{jumlah penduduk}_t} \dots\dots\dots(2.1)$$

atau

$$\text{PNB perkapita} = \frac{\text{PNB}_t}{\text{jumlah penduduk}_t} \dots\dots\dots(2.2)$$

Dimana: PDB = produk domestik bruto

PNB = produk nasional bruto

Todaro (2003:18) menyebutkan bahwa pendapatan per kapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan

penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu negara, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi.

Menurut Jhingan (2003:31) pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Hal ini disebabkan ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar atau mungkin juga pola hidup menjadi makin konsumtif, setidaknya tidaknya semakin menuntut kualitas yang baik. Hal inilah yang menyebabkan pendapatan rumah tangga sebagai salah satu faktor yang menentukan tingkat konsumsi (Rahardja dan Manurung, 2008: 265).

Pendapatan akan menjadi ukuran besarnya tingkat permintaan barang dan jasa. Secara regional dan spasial dalam suatu wilayah, ukuran pendapatan dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Menurut Cebula dan Toma (2008), semakin besar pendapatan perkapita di suatu daerah, semakin

besar tingkat rata-rata permintaan untuk barang dan jasa di daerah tersebut. Pada gilirannya, berdasarkan respon dari kondisi pasar, permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa mensyaratkan (mendorong) tingginya harga rata-rata komoditi barang dan jasa tersebut, dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hubungan Pendapatan Perkapita dengan Pengeluaran untuk Jaminan Sosial

Adolf Wagner dalam (Guritno, 2001:171) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

3. Struktur Usia Penduduk

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (uu no. 23 th 2006). Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Dalam arti luas, penduduk atau populasi berarti sejumlah makhluk sejenis yang mendiami atau menduduki tempat tertentu. Bahkan populasi dapat pula dikenakan pada benda-benda sejenis yang terdapat pada suatu tempat. Dalam kaitannya dengan manusia, maka pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami dunia atau bagian-bagiannya. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal.

Macam-macam komposisi penduduk (BPS):

1. Berdasarkan aspek biologis.

Misalnya : penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

- a. Umur 0 – 14 tahun dinamakan usia muda/usia belum produktif.
- b. Umur 15 – 64 tahun dinamakan usia dewasa/usia kerja/usia produktif.
- c. Umur 65 tahun keatas dinamakan usia tua/usia tak produktif/usia jompo.

Sesuai dengan pengelompokkan umur di atas, maka struktur (susunan) penduduk negara-negara di dunia dibagi 3 yaitu:

1. Struktur penduduk muda : bila suatu negara atau wilayah sebagian besar penduduk usia muda.
 2. Struktur penduduk dewasa : bila suatu negara sebagian besar penduduk berusia dewasa.
 3. Struktur penduduk tua : bila suatu negara sebagian besar terdiri penduduk berusia tua.
2. Berdasarkan aspek sosial, penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan.

Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan nonproduktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependency ratio*). Angka ini sangat penting diketahui karena dapat memperkirakan beban tiap penduduk non produktif untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif (15-65 th). Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia nonproduktif. Penduduk usia produktif akan terbebani oleh penduduk yang tidak berkualitas untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi mereka sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Semakin besar angka ketergantungan, akan semakin besar beban penduduk dalam menopang kehidupan.(Statistik daerah Provinsi Sumatera Barat 2012:10).

Hal ini biasanya terjadi di negara berkembang dan terbelakang, dimana angka ketergantungan umumnya masih besar. Artinya jumlah penduduk usia non produktif jumlahnya masih besar, sehingga penduduk usia produktif harus menanggung kehidupan penduduk usia non produktif yang jumlahnya lebih banyak. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia nonproduktif.

Hubungan Penduduk Usia Non Produktif dengan Pengeluaran untuk Jaminan Sosial

Teori Rostow dan Musgrave, (Guritno 2001:107) Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan

masyarakat, dan sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penduduk usia tidak produktif/usia lanjut maka pengeluaran untuk aktivitas sosial/jaminan sosial juga semakin besar.

Menurut Badan Pusat Statistik, Penduduk yang masuk kategori umur tua adalah mereka yang berumur 65-75 tahun keatas. Negara yang sebagian besar penduduknya berada pada kelompok umur tua pada umumnya adalah Negara-negara maju karena umumnya Negara-negara maju memiliki angka *life expectancy* yang tinggi. Semakin banyak penduduk dalam kelompok umur tua artinya semakin besar beban yang dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

4. Penerimaan Pajak

a. Pengertian pajak

Pajak adalah pungutan yang ditarik dari masyarakat yang tidak menimbulkan kewajiban bagi pemerintah terhadap pihak pembayar pajak. Menurut sifatnya pajak adalah wajib (Prawoto; 2011). Sedangkan pajak menurut Guritno Mangkoesobroto adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogative pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya (Mangkoesobroto 2001:181).

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sector pemerintah) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment (Negara dkk; 2006).

Menurut Djajadiningrat pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum (Negara dkk; 2006).

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk

membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Unsur –Unsur Pajak

a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b) Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah

d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

c. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak memberikan penjelasan mengenai mengenai hak negara untuk memungut pajak. Teori- teori tersebut antara lain:

(a) Teori asuransi

Teori ini mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi dalam perjanjian asuransi. Hal tersebut ditujukan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan negara dalam melaksanakan kewajibannya yaitu, melindungi keselamatan dan harta benda warga negaranya. Teori ini banyak ditentang, karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi

(b) Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing masing warga negara, termasuk kepentingan dalam dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

(c) Teori Daya Pikul

Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan:

- 1) Unsur objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

(d) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

(e) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Hubungan Penerimaan Pajak dengan Pengeluaran untuk Jaminan Sosial

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

(Teori Peacock dan Wiseman) mengatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam

keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan pemerintah. Penerimaan pajak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah dan sebaliknya pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

B. Penelitian Terdahulu

1. FM Mayoral (2014) penelitian yang berjudul “Determinants of Social Spending in Latin America: A Dynamic Panel Data Error-correction Model Analysis” Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi untuk mempelajari faktor-faktor penentu belanja sosial, di tujuh belas negara-negara berkembang di Amerika Latin untuk periode 1990-2010. Penelitian juga menemukan efek ekonomi yang signifikan bagi globalisasi, pendapatan perkapita dan tingkat pengangguran. PDB per kapita memiliki dampak positif yang signifikan terhadap total belanja, pendidikan dan kesehatan, membenarkan hukum Warner meningkatkan kegiatan negara.
2. Dalam jurnal yang berjudul “The determinants of social spending in 15 European countries, 1950-1980 Are dictatorships less redistributive” yang merupakan hasil penelitian dari SE Barroso (2009) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, tingkat PDB per kapita tidak memiliki efek yang jelas pada belanja sosial, sedangkan tanda negatif dari variabel pertumbuhan PDB menunjukkan adanya melawan efek siklus. Variabel independen juga mencerminkan hasil yang sama, menunjukkan efek positif dan signifikan pada

perkembangan beberapa jenis pengeluaran sosial. Mengenai variabel demografis, penduduk di atas 65 menunjukkan efek positif pada pensiun dan pengeluaran kesejahteraan, meskipun dampak keseluruhan pada belanja sosial tampaknya lebih kecil daripada periode 1950-1961. Demikian pula anak-anak variabel, yang mencerminkan total populasi berusia antara 5 dan 19 tahun, memiliki pengaruh positif yang signifikan pada evolusi belanja pendidikan.

3. Dalam jurnal yang berjudul “The Ageing Population of Brunei Darussalam: Trend and Economic Consequences” yang merupakan hasil penelitian dari Azim (2002) menganalisis dampak ageing population di Brunei Darussalam terhadap kondisi makro perekonomiannya secara deskriptif. Diperoleh hasil bahwa peningkatan tajam dalam proporsi pensiunan menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan biaya yang lebih besar di bidang kesehatan dan dana pensiun. Proporsi kenaikan ini menyebabkan berkurangnya anggaran untuk proyek – proyek lain. Hal ini membuat pemerintah berusaha membuat kebijakan baru dengan jalan mengurangi tunjangan pensiun. Selain itu peningkatan pertumbuhan penduduk tua menyebabkan berkurangnya tabungan (saving) karena pendapatan yang diperoleh pensiunan lebih sedikit dari pekerja. Sedikit tabungan berarti sedikit investasi, yang pada gilirannya akan mengurangi pasokan barang dan jasa secara agregat, inilah yang menyebabkan turunnya pendapatan nasional.

4. Sri Retnowati (2014) Penelitiannya yang berjudul Hubungan Kausalitas Antara Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 1980 – 2012. Penelitian ini menggunakan metode Granger Causality Test untuk meneliti pola atau arah hubungan kausalitas antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 1970-2004. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian menggunakan uji kausalitas granger menunjukkan bahwa hipotesis nol untuk TX (penerimaan pajak dalam negeri) mempengaruhi G (pengeluaran pemerintah pusat) ditolak, dengan ditunjukkan pada probabilitas $(0,0135) < \alpha (0,05)$ pada Lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara penerimaan pajak dengan pengeluaran. Hasil kedua hipotesis nol untuk G (pengeluaran pemerintah mempengaruhi TX (penerimaan pajak dalam negeri) juga di tolak, hal ini di tunjukkan pada probabilitas $(0,0102) < \alpha (0,05)$ pada lag 3, yang berarti ada pola kausalitas antara pengeluaran pemerintah dengan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pola hubungan kausalitas dua arah antara penerimaan pajak dengan pengeluaran pemerintah di Indonesia.

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan agar dapat diketahui beberapa pendapat atau hasil yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

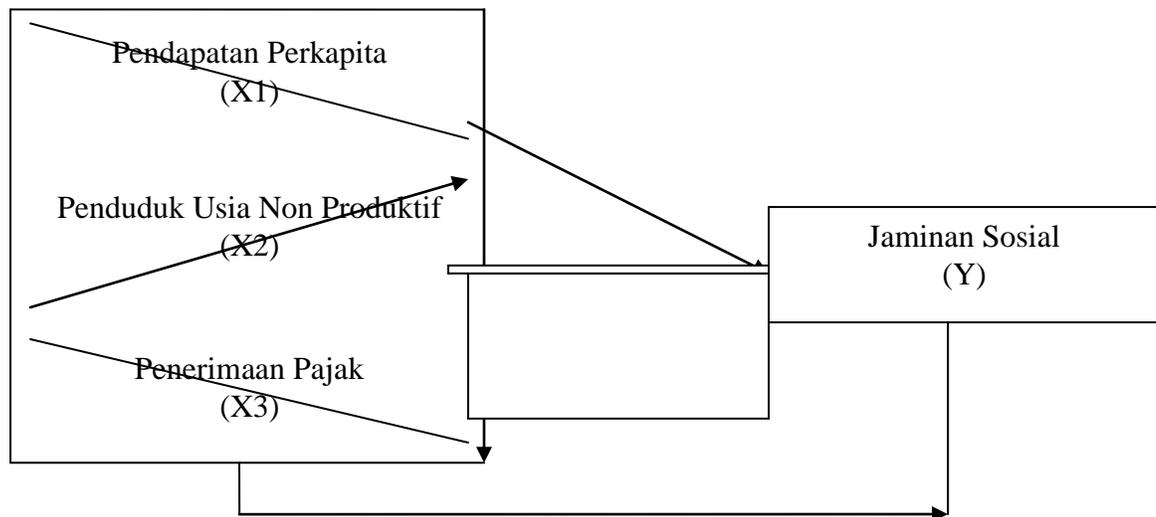
C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai kerangka berfikir bagi peneliti untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita (X_1), penduduk usia non produktif (X_2), dan penerimaan pajak (X_3) sebagai variabel bebas terhadap pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial (Y) sebagai variabel terikat.

Pendapatan perkapita (X_1) berpengaruh positif terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial (Y). Peningkatan pendapatan perkapita akan mempengaruhi pengeluaran untuk jaminan sosial. Karena dengan meningkatnya pendapatan perkapita suatu masyarakat, juga akan menyebabkan meningkatnya jumlah pajak yang harus di bayar oleh masyarakat tersebut, dan hal ini akan meningkatkan pendapatan Negara, dengan meningkatnya penerimaan pemerintah juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, termasuk alokasi belanja jaminan sosial/perlindungan sosial juga ikut meningkat dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita yang tinggi maka tingkat konsumsinya juga tinggi, maka permintaannya terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan juga ikut meningkat. Maka pemerintah dan pihak swasta bekerja sama untuk menyediakan semua kebutuhan tersebut.

Penduduk usia non produktif (X_2) berpengaruh positif terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial. Semakin banyak penduduk usia non produktif/lansia maka pengeluaran untuk jaminan sosial juga semakin meningkat. Semakin banyak penduduk dalam kelompok umur tua/tidak produktif maka beban pemerintah semakin besar, seperti beban dalam pembayaran pensiun, perawatan kesehatan fisik dan kejiwaan lanjut usia (lansia), pengaturan tempat tinggal dan lain-lain yang perlu mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Penerimaan pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial (Y). Semakin besar penerimaan pajak suatu Negara maka pengeluaran untuk jaminan sosialnya juga semakin besar. Pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dari unsur penerimaan daerah, yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah, dengan meningkatnya penerimaan suatu daerah tersebut maka secara tidak langsung juga meningkatkan pengeluaran/belanja suatu daerah, termasuk pengeluarann untuk jaminan sosial. Secara sistematis, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual (Pengaruh Pendapatan Perkapita, Penduduk usia non Produktif dan Penerimaan Pajak terhadap Jaminan Sosial di Sumatera Barat).

D. Hipotesis Penelitian

Bedasarkan kajian teoritis dan kerangka konseptual diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara signifikan pendapatan perkapita terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0 \quad (\text{tidak berpengaruh signifikan})$$

$$H_1 : \beta_1 \neq 0 \quad (\text{berpengaruh signifikan})$$

2. Terdapat pengaruh secara signifikan penduduk usia non produktif terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad (\text{tidak berpengaruh signifikan})$$

$$H_1 : \beta_2 \neq 0 \quad (\text{berpengaruh signifikan})$$

3. Terdapat pengaruh secara signifikan penerimaan pajak terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad (\text{tidak berpengaruh signifikan})$$

$$H_1 : \beta_3 \neq 0 \quad (\text{berpengaruh signifikan})$$

4. Terdapat pengaruh secara signifikan pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif, dan penerimaan pajak secara bersama-sama terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial provinsi Sumatera Barat.

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad (\text{tidak berpengaruh signifikan})$$

$$H_1: \text{salah satu } \beta \neq 0 \quad (\text{berpengaruh signifikan})$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis regresi panel dan pembahasan terhadap hasil penelitian, antara variabel bebas pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif, dan penerimaan pajak, terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat baik secara parsial maupun secara bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat.
2. Penduduk usia non produktif/lansia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat.
3. Penerimaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat.
4. Karena hipotesis alternatif (H_a) yang diajukan dalam penelitian ini diterima, maka Pendapatan perkapita, penduduk usia non produktif/lansia,

dan penerimaan pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran untuk jaminan sosial kabupaten kota di provinsi Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah di kemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian yang di peroleh, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk jaminan sosial di provinsi Sumatera Barat, karena pengeluaran untuk jaminan sosial di Sumatera Barat masih rendah. Dengan meningkatnya pengeluaran untuk jaminan sosial maka penduduk yang lemah juga akan merasakan kesejahteraan dan mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi dana untuk jaminan sosial dari total APBD yang masih rendah yaitu sebesar 1 persen dari total belanja pemerintah dan harus ditingkatkan menjadi 5 persen atau lebih. Pemerinta juga perlu mempertibangkan alokasi dana berdasarkan banyaknya jumlah penduduk yang tidak produktif.
3. Pemerintahan sumatera barat perlu meningkatkan pendapatan perkapita dengan cara menggiatkan usaha di semua sektor perekonomian yang

dapat memacu perkembangan ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi.

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial/perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhirmen. 2005. *Statistika 1*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2001 *Sumatera Barat Dalam Angka 2012-2014*. BPS Provinsi Sumatera Barat.
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2011-2013*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika).
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/kota Sumatera Barat 2013-2014*. Padang : BPS (Badan Pusat statistika).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan *APBD Klasifikasi Fungsi*. Diunduh dari <http://www.djpk.depkeu.go.id> tanggal 18 April 2014.
- Depkes. Tahun 2004 tentang jaminan sosial di Indonesia
- FM Mayoral. 2014. *Determinants of Social Spending in Latin America: A Dynamic Panel Data Error-correction Model Analysis*. Diakses tanggal 10 Oktober 2015.
- Gujarati, Damondar.2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Ekonomika Pembangunan : Masalah, Kebijakan, Dan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkoesebroto, guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPF E.
- Mudiyono.2002. *Jaminan Sosial Di Indonesia:Relevansi Pendekatan Informal*. Vol 6, No.1 Juli 2008 hal (67-78)
- Prawoto. 2011. *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: BFE.
- Rahardja dan Manurung. 2008. *Teori ekonomi makro*. Yogyakarta : FE UI.